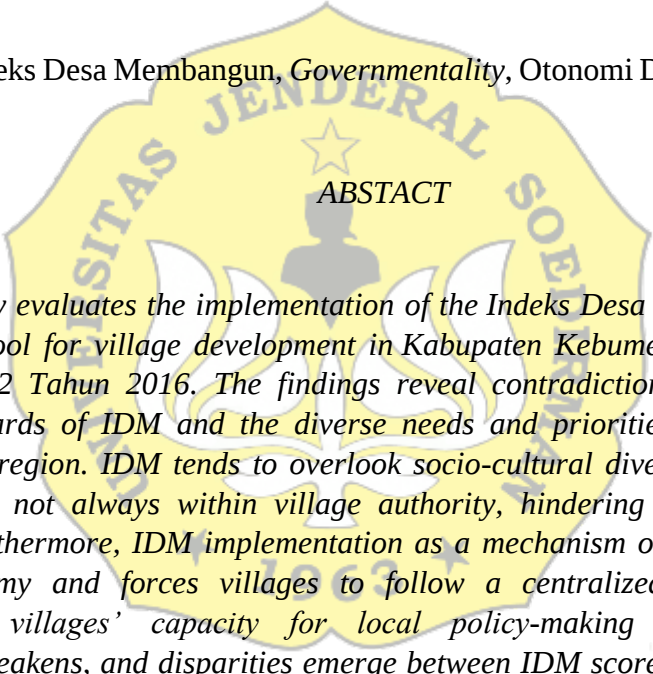


ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi penerapan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur pembangunan desa di Kabupaten Kebumen berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016. Temuan menunjukkan adanya kontradiksi antara standar nasional IDM yang seragam dengan kebutuhan dan prioritas beragam desa mandiri di daerah tersebut. IDM cenderung mengabaikan keragaman sosial budaya dan kebutuhan layanan publik yang tidak selalu dalam kewenangan desa, sehingga menghambat perencanaan dan alokasi sumber daya. Selain itu, implementasi IDM sebagai mekanisme *governmentality* membatasi otonomi desa dan memaksa desa mengikuti agenda pembangunan yang sentralistik, akibatnya, kapasitas desa dalam pembuatan kebijakan lokal menurun, partisipasi masyarakat melemah, dan terjadi ketimpangan antara skor IDM dan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Rekomendasi penelitian ini adalah evaluasi dan penyesuaian kebijakan IDM agar lebih responsif, adaptif, dan memberdayakan desa secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kata kunci: Indeks Desa Membangun, *Governmentality*, Otonomi Desa, Pembangunan Desa



ABSTACT

This study evaluates the implementation of the Indeks Desa Membangun (IDM) as a measurement tool for village development in Kabupaten Kebumen based on Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016. The findings reveal contradictions between the uniform national standards of IDM and the diverse needs and priorities of independent-status villages in the region. IDM tends to overlook socio-cultural diversity and public service needs that are not always within village authority, hindering planning and resource allocation. Furthermore, IDM implementation as a mechanism of governmentality limits village autonomy and forces villages to follow a centralized development agenda. Consequently, villages' capacity for local policy-making decreases, community participation weakens, and disparities emerge between IDM scores and actual community welfare.

Keywords: Indeks Desa Membangun, *Governmentality*, Village Autonomy, Village Development.